

Membangun Kampung di Papua Barat

Waroser adalah kampung pertama di Papua Barat yang memiliki profil kampung yang dapat diakses secara daring melalui website. Kampung ini juga yang pertama kali menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) dalam penyusunan program kerja kampung sejak 2019



Pemerintah Kampung Waroser memungkinkan anggaran pelayanan posyandu, pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu) hingga penanganan anak dengan gizi kurang meningkat dari Rp10 juta menjadi Rp45 juta per tahun

Waroser adalah satu dari 14 kampung di Distrik¹ Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Kampung ini berjarak 35 km dari Ibu Kota Kabupaten Manokwari Selatan di Distrik Ransiki. Kata Waroser sendiri berasal dari bahasa Biak, yaitu *War* yang berarti air atau sungai, dan *Oser* yang artinya satu. Waroser sendiri memiliki makna 'sungai yang mempunyai satu aliran'. Kampung Waroser terbentuk saat Lambertus Anari ditunjuk sebagai kepala kampung pada tahun 1975. Kampung ini memiliki luas wilayah 1,91 Km² yang dihuni sebanyak 171 keluarga atau 719 jiwa. Sebanyak 95% diantaranya bekerja sebagai nelayan, mengingat kampung ini berhadapan langsung dengan Teluk Cenderawasih.

Meskipun memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, dan perikanan, kemiskinan menjadi tantangan pembangunan terbesar di Waroser. Kemiskinan menyebabkan: sebagian warga tidak mampu memiliki rumah layak huni dan akses air bersih; rentannya kondisi kesehatan ibu, anak serta lansia; serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di kampung ini, baru 15% (108 jiwa) warga yang menamatkan pendidikan di bangku sekolah dasar. Sementara kasus, diare, malaria, hipertensi, diabetes, HIV/AIDS, serta balita yang mengalami gizi buruk dan kasus kematian ibu hamil lazim ditemui di kampung ini.

Menurut Samuel Waromi, Kepala Kampung Waroser, kondisi ini disebabkan karena kampung belum memiliki data akurat kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai basis perencanaan dan penganggaran. "Dulu program kampung seringkali tidak terarah. Akibatnya banyak persoalan kampung yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, seperti soal kesehatan dan pendidikan masyarakat," terangya.

¹ Distrik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut "kecamatan" di provinsi Papua dan Papua Barat

Kondisi yang dihadapi Pemerintah Kampung Waroser jamak ditemui di kampung-kampung lain di Provinsi Papua Barat. Data yang seharusnya menjadi dasar perencanaan pembangunan menjadi kemewahan bagi sebagian besar kampung di Papua Barat. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia menjadi tantangannya.

Mengingat peran penting data dalam perencanaan dan penganggaran bahkan dari tingkat kampung, pada 2017, Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan program KOMPAK-LANDASAN meluncurkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK. SAIK adalah platform digital untuk menyimpan dan memutakhirkan data kependudukan, sosial, dan ekonomi setiap warga kampung. Sistem yang dikelola oleh kader kampung ini menyediakan data akurat bagi pemerintah kampung sebagai dasar perencanaan program pembangunan.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama KOMPAK meningkatkan kemampuan SAIK dengan menambahkan fitur integrasi data antar kampung, distrik, kabupaten dan provinsi yang dapat diakses secara *online* sehingga data kampung dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Hasil pengembangan ini dinamakan SAIK Plus (SAIK+).

Salah satu komponen penting SAIK+ adalah Kader Kampung yang bertugas mendata, membantu Kepala Kampung melakukan verifikasi dan validasi data serta menginput hasil pendataan ke SAIK+. Betty Emilia Seeum, salah satu Kader Kampung Waroser mengatakan, setiap hari dirinya mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan data kependudukan masyarakat seperti KTP, KK atau akta kelahiran. "Rata-rata saya berkunjung ke 20 rumah dalam sehari. Selain mengumpulkan data kependudukan, saya juga mengumpulkan sekaligus memperbaharui profil warga seperti status perkawinan, kondisi kesehatan, kondisi anak, sekaligus melakukan pengecekan terhadap status warga penerima bantuan sosial," tutur Kader Kampung yang telah bertugas selama tiga tahun ini. Betty menambahkan pembaharuan data dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan data SAIK+ tetap valid dan akurat.

Semuel Waromi mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran SAIK+ yang diinisiasi oleh pemerintah daerah bersama KOMPAK. Menurutnya, SAIK+ menjadi penunjuk arah bagi aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM), dan seluruh tokoh masyarakat dalam merencanakan pembangunan kampung. "Apalagi, pada tahun 2019, kami mendapat pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau RPJMK. Jadi hasil pendataan lewat SAIK+ dapat langsung kita gunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kampung," imbuhnya.



Yakobus Frits Ramar, Kepala Distrik Oransbari memimpin diskusi tentang berbagai persoalan di wilayah mereka bersama dengan perangkat distrik

Menurut Yakobus Frits Ramar, Kepala Distrik Oransbari, pelatihan penyusunan RPJMK menjadi kebutuhan mendesak mengingat selama ini semua kampung di Distrik Oransbari terlambat mencairkan Dana Desa karena kesulitan menyusun dokumen-dokumen pembangunan seperti RPJMK, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung. “Kemampuan pemerintah kampung menyusun dokumen-dokumen ini sangat penting karena program pembangunan kampung bisa terlaksana sesuai kebutuhan riil dan sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten,” terangnya.

Selama dua bulan, sebanyak 11 perwakilan pemerintah dan masyarakat Kampung Waroser mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah bersama program KOMPAK-LANDASAN. Walhasil, pada 2019, Kampung Waroser menjadi kampung pertama di Papua Barat yang telah menyusun dan memanfaatkan RPJMK sebagai basis pembangunan. “Setelah Pemerintah Kampung Waroser memiliki dokumen RPJMK, pemerintah di 13 kampung lainnya juga ingin mendapatkan pelatihan. Akhirnya, pada tahun 2021, kami berhasil menuntaskan pelatihan penyusunan RPJMK untuk 13 kampung di Distrik Oransbari,” papar Yakobus.

Upaya yang Membuahkan Hasil

Kini sebagian besar warga Kampung Waroser telah merasakan manfaat SAIK+ sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Sekarang, program pembangunan kampung tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga. Hal inilah yang dirasakan Charles Efrain Wiay. Pria berusia 50 tahun ini termasuk salah satu dari empat penerima bantuan rumah layak huni dari Pemerintah Kampung Waroser. Ia menempati rumah permanen tipe 36 ini sejak dua tahun lalu. Sebelumnya Charles menempati sebuah rumah semi permanen berbahan kayu selama 20 tahun terakhir. Untuk menopang ekonomi keluarga, Charles bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan tak tentu. “Kadang 100.000, kadang 50.000, kadang juga tidak ada. Tergantung orang yang mau kasih kerja,” ujar Charles. Sementara istrinya, Miryam Petronella Marani, setiap hari berjualan buah pinang di kampung. “Saya sangat bahagia mendapatkan bantuan rumah dari program yang dicanangkan Pemerintah Kampung Waroser. Kini keluarga saya bisa tinggal di tempat yang layak,” tutur ayah dua anak ini.



Rumah Agdamina Kareni, salah satu penerima bantuan air bersih dari Pemerintah Kampung Waroser

Tak jauh dari rumah Charles, Agdamina Kareni, ibu dengan tiga anak, tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih untuk memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. Wanita berusia 41 tahun ini termasuk salah satu dari 30 penerima bantuan sumur air dan tandon 500 liter. Sebelumnya Agdamina mengambil air di sumur milik tetangganya. “Kini kami tak lagi perlu berjalan kaki untuk mengambil air. Keperluan air bersih untuk memasak, konsumsi sehari-hari serta mandi sudah tercukupi berkat program pengadaan sumur di rumah warga,” ujar Agdamina.

Selain rumah dan air bersih, masyarakat juga mendapat bantuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Bergita Wamate, salah satu tokoh perempuan dan juga kader gizi di Waroser mengaku program pembangunan Pemerintah Kampung Waroser memungkinkan anggaran pelayanan posyandu, pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu) hingga penanganan anak dengan gizi kurang meningkat dari Rp10 juta menjadi Rp45 juta per tahun. “Sekarang, pelaksanaan program berjalan lebih efektif karena tepat sasaran. Misalnya program pemberian makanan tambahan bagi 12 anak dengan gizi kurang. Kini kondisi keduabelas anak itu semakin membaik,” ungkap Bergita.

Sementara Paskalin Wosiri, salah seorang siswa SD YPK Ora Et Labora di Kampung Waroser menjadi salah satu dari 100 siswa yang mendapatkan bantuan seragam. Paskalin juga mengikuti kegiatan les untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Bantuan seragam dan pembiayaan les bagi anak-anak seperti Paskalin merupakan salah satu program yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Waroser. “Saya sangat senang bisa mendapatkan tambahan seragam merah putih. Kini saya lebih bersemangat ke sekolah karena tidak lagi menggunakan seragam yang sama hingga sehari-hari,” ungkap anak berusia 10 tahun ini.

Dukungan Pemerintah

Berkat SAIK+, program-program berkualitas yang dibutuhkan warga pun lahir melalui RPJMK. Pembangunan rumah layak huni, sumur dan fasilitas air bersih, bantuan seragam sekolah dan les tambahan bagi pelajar, serta alokasi untuk layanan kesehatan seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kampung Waroser untuk mengatasi tantangan pembangunan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Keberhasilan uji coba pelaksanaan SAIK+ dan pelatihan penyusunan RPJMK di Distrik Momi Waren, Ransiki, dan Oransbari mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk mereplikasi SAIK+ dan pelatihan penyusunan RPJMK ke seluruh enam distrik di kabupaten ini. "Melalui Pokja PROSPPEK-Otsus atau Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung Otonomi Khusus, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,25 miliar untuk pelaksanaan pelatihan SAIK dan RPJMK di seluruh distrik," terang Kristinov Simaela, Koordinator program KOMPAK-LANDASAN Manokwari Selatan.

Hengky V. Tewu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat, pelatihan penyusunan RPJMK yang diinisiasi dalam program KOMPAK-LANDASAN, telah berhasil mendorong aparatur distrik bersama jajaran pemerintahan kampung untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan lebih baik lagi. Ia pun menilai data SAIK+ mempermudah tim saling menyepakati RPJMK yang disusun bersama.

"RPJMK bukan hanya sekedar sebuah rencana saja namun merupakan suatu media komunikasi bersama antara anggota tim penyusunnya. Data SAIK+ dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah di kampung sebelum menetapkan sebuah program," papar Hengky. Ia pun menilai, sistem pengisian data warga ke dalam aplikasi SAIK+ juga berdampak pola kerja Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. "Banyak staf kami yang terlibat membantu program KOMPAK-LANDASAN, seperti penyusunan RPJMK dan pengelolaan SAIK+. Kini mereka juga telah terbiasa bekerja sekaligus menginput data ke aplikasi, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Ia berharap pelaksanaan program KOMPAK-LANDASAN tetap berlanjut di Manokwari Selatan karena telah membantu pemerintah dan masyarakat setempat. "Apabila suatu saat program ini berakhir, kami berharap tim program KOMPAK-LANDASAN bisa mewariskan tanggung jawab pelaksanaan ini untuk diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan," tutup Hengky.

